

JUNI 2025

MAJALAH JDIH KAB MAGELANG

JARINGAN
DOKUMENTASI
DAN
INFORMASI
HUKUM



**DOWNLOAD
SEKARANG!**

EDISI

02



Motto

“Lengkap, Akurat, Mudah, Cepat”

Salam JDIH



GRENGSENG PAMUJI

Bupati Kabupaten Magelang

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Pimpinan Redaksi | : Ratna Yulianty, S.H., M.H. |
| 2. Wakil Pimpinan Redaksi | : Ruswanto, S.H |
| 3. Dokumentasi | : M. Yuranda Bakda Maulana, S.Kom |
| 4. Editor / Ilustrator | : Nasrul Amin, S.I.Pust |
| 5. Staf Redaksi | : Roro Subekti, S.I.Pust Nasrul Amin, S.I.Pust M. Yuranda Bakda Maulana, S.Kom |



SALAM REDAKSI

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Majalah JDIH Kabupaten Magelang edisi kedua. Majalah ini merupakan sarana yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kebijakan, kegiatan, rencana dan realisasi dari program - program Pemerintah Kabupaten Magelang terutama berkaitan tentang hukum.

Majalah ini juga menyajikan dan membahas berbagai macam informasi lain diluar konteks hukum yang bisa menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan para pembaca. Tak lupa kami mengharapkan saran, masukan dan kritik agar pengembangan majalah ini bisa menjadi lebih baik lagi sehingga bisa menyajikan sesuatu yang berkualitas dan berintegritas di kemudian hari.

Demikian kata pengantar dari Redaksi yang bisa kami sampaikan, besar harapan kami, majalah ini bisa menjadi wadah informasi yang baik dan bermutu sehingga bisa berkontribusi bagi kemajuan pembangunan di bidang hukum baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Sekian dan Terima Kasih

Kota Mungkid, Juni 2024

Hormat Kami,

Redaksi Majalah JDIH Kabupaten Magelang



01

LAYANAN PUBLIK

Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang

02

BERITA BAGIAN HUKUM

Penghargaan Pengelolaan JDIH Tingkat Jawa Tengah 2025

04

BERITA BAGIAN HUKUM

Melayani Masyarakat Melalui Klinik Hukum

06

BERITA BAGIAN HUKUM

Paparan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2025

08

REVIEW PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2025

10

PANTUN HUKUM

11

TOKOH HUKUM

Baharuddin Lopa

13

SADAR HUKUM

Jerat Hukum bagi Pengedar Narkoba

15

RESENSI HUKUM

Etika dan Moral Penegak Hukum di Indonesia

16

Objek Wisata (Sobat JDIH)

Pesona Alam Gunuk Gupak

LAYANAN PUBLIK

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG



Google Play

APLIKASI ANDROID JDih KABUPATEN MAGELANG



JDih KABUPATEN MAGELANG MOBILE

Halo Masyarakat Magelang!

Aplikasi Android JDih Kabupaten Magelang kini hadir dalam versi mobile untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen hukum dan informasi hukum di Kabupaten Magelang.

AYO DOWNLOAD SEKARANG JUGA!



KANTOR
BAGIAN
HUKUM



KLINIK HUKUM
KABUPATEN MAGELANG





Penghargaan Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

SABET TERBAIK II, PENGELOLA JDIH KATEGORI KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Kabupaten Magelang kembali menorehkan prestasi gemilang. Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Magelang meraih Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik ke-II Kategori Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, kepada Bupati Magelang Grengseng Pamuji dalam sebuah seremoni di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Capaian ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dedikasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola JDIH di tahun 2024, serta keberhasilannya mendorong keterbukaan dan literasi hukum di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan wawancara secara khusus, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji menegaskan bahwa pengelolaan JDIH selaras dengan visi pembangunan daerah berbasis data, terutama dalam ranah hukum. Ia juga menyoroti pentingnya perluasan informasi hukum hingga ke tingkat desa.



"Nah, setelah ini diatur perlahan agar desa juga paham,"

GRENGSENG PAMUJI
BUPATI KABUPATEN MAGELANG

Upaya ini terlihat nyata dengan inovasi Pojok JDIH Desa, yang menjadi bagian dari strategi sosialisasi hukum kepada masyarakat pedesaan.

Pemanfaatan Konsultasi Klinik Hukum oleh Masyarakat

MELAYANI MASYARAKAT MELALUI KLINIK HUKUM



Kehadiran Klinik Hukum sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum karena ketidaktahuan. Edukasi hukum secara langsung membekali masyarakat agar lebih sadar hukum, mampu menyelesaikan masalah secara bijak, dan tidak menjadi korban ketidakadilan.

Klinik hukum tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga pendampingan hukum jika diperlukan. Ini mencakup penyusunan dokumen hukum, surat pengaduan, hingga pendampingan ke lembaga peradilan atau instansi pemerintah yang berkaitan dengan persoalan hukum masyarakat.

Pelayanan di Klinik Hukum kabupaten Magelang dilakukan oleh Bagian Hukum melalui Staf Bantuan Hukum. Ini menjadi fasilitas pelayanan hukum sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Dengan pendekatan edukatif, masyarakat dibantu memahami hak dan kewajibannya secara hukum.

Klinik hukum juga hadir sebagai sarana untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Melalui konsultasi gratis, masyarakat dapat memperoleh pemahaman hukum atas permasalahan mereka dan solusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan terus mengembangkan layanan dan meningkatkan kualitas layanan, Klinik Hukum Kabupaten Magelang dapat menjadi jembatan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dukungan pemerintah dan pihak - pihak terkait akan memperkuat peran klinik hukum sebagai garda terdepan pelayanan hukum di Kabupaten Magelang.

Paparan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang menggelar Paparan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Command Center Room Pusaka Gemilang dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto.

Paparan ini membahas lima rancangan peraturan daerah yang akan menjadi landasan hukum dalam berbagai sektor pemerintahan daerah yaitu:



1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
4. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Adi Waryanto menekankan bahwa perubahan dan penyusunan peraturan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan OPD terkait, akademisi, serta pihak lain yang berkepentingan dalam penyusunan kebijakan daerah. diharapkan, pembahasan ini dapat menghasilkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan di Kabupaten Magelang.



Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2025



Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2025 mengatur ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Tujuannya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Pemerintah diberikewenangan bertindak secara preventif dan represif terhadap berbagai gangguan sosial di wilayah kabupaten.



Perda ini memperkuat peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban. Penegakan dilakukan secara tegas namun tetap humanis. Pemerintah juga mengatur pelarangan terhadap aktivitas yang meresahkan masyarakat, seperti keributan, pelanggaran jam malam, hingga kegiatan tanpa izin yang mengganggu kenyamanan publik.

Pelindungan masyarakat dijalankan melalui Satlinmas, pelatihan tanggap darurat, serta sistem pelaporan cepat. Pemerintah membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana dan konflik sosial. Kolaborasi antarinstansi dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membentuk masyarakat yang siap menghadapi situasi darurat dengan tenang dan terorganisir.

Partisipasi aktif warga menjadi kunci sukses pelaksanaan perda. Masyarakat diajak menjaga lingkungan, melapor jika ada gangguan, dan mematuhi aturan. Pemerintah menyediakan sistem pengaduan yang responsif. Ketenteraman dan ketertiban akan tercapai bila semua pihak bekerja sama secara konsisten dan berkesinambungan.

Pantun Hukum hari ini.



Pergi ke Pasar membeli Ikan
Tidak lupa membeli buah Anggur
Keadilan di Indonesia harus ditegakkan
Agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

———— **CAKEP!!!** ————

Di Korea ada musim salju
Musim panas ada di Kota Bekasi
Jangan berharap negara akan maju
Kalau korupsi tidak cepat diatasi.

———— **CAKEP!!!** ————



BAHARUDDIN LOPA, SI JAKSA LANGIT

Baharuddin Lopa merupakan tokoh hukum Indonesia yang dikenal jujur, tegas, dan tak kenal kompromi terhadap korupsi. Lahir di Mandar, Sulawesi Barat, tahun 1935, ia mengabdikan hidupnya sebagai penegak hukum. Sosoknya menjadi simbol integritas dan keberanian dalam menegakkan keadilan di Indonesia.

Ia memulai karier sebagai Jaksa Tinggi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, ia membongkar banyak kasus korupsi lokal tanpa pandang bulu, lalu menjabat berbagai posisi strategis seperti Ketua Komnas HAM, Duta Besar untuk Arab Saudi, dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ketegasannya membongkar kasus korupsi menjadikannya dihormati dan disegani. Ia sering dijuluki “**Jaksa Langit**” karena sikapnya yang tidak bisa disuap.

Pada tahun 2001, Baharuddin Lopa diangkat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Meski menjabat singkat, ia telah menciptakan dampak besar dalam reformasi hukum. Ia meninggal dunia saat menjalankan tugas di Riyadh, Arab Saudi, dan meninggalkan kesan mendalam sebagai pejuang hukum yang tak tergoyahkan.

Warisan Baharuddin Lopa terus hidup dalam dunia hukum Indonesia. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menjunjung tinggi kejujuran, keberanian, dan keadilan. Nama dan nilai-nilainya tetap dikenang dalam berbagai institusi hukum, menjadi simbol keteladanan bagi para penegak hukum di masa depan.

STOP NARKOBA



JERAT HUKUM BAGI PENGEDAR NARKOBA

Pengedar narkoba di Indonesia dikenai hukuman berat sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindakan mengedarkan narkoba dianggap sebagai kejahatan serius karena merusak generasi bangsa. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pengedar dilakukan dengan tegas tanpa kompromi.

Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, atau seumur hidup, bahkan hukuman mati jika dalam jumlah besar.

Selain Pasal 114, Pasal 112 UU Narkotika juga sering digunakan terhadap pengedar yang menyimpan atau menguasai narkotika tanpa hak. Hukuman penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 12 tahun, ditambah denda yang besar, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku

Pengedar yang terbukti berulang kali melakukan tindak pidana narkotika dapat dikenai pemberatan hukuman. Jaksa sering menuntut hukuman maksimal apabila pengedar terbukti memiliki jaringan atau melakukan transaksi dalam jumlah besar. Hakim pun memiliki kewenangan menjatuhkan pidana seumur hidup hingga hukuman mati.

Hukum bagi pengedar narkoba menunjukkan betapa seriusnya negara memerangi kejahatan narkotika. Penegakan hukum dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba. Masyarakat diimbau berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan agar peredaran narkoba bisa ditekan secara menyeluruh.



Judul : **Etika dan Moral Penegak Hukum di Indonesia**

Penulis :

1. A. Salman Maggalatung
2. Muhammad Ishar Helmi

Penerbit : Rajawali Pers

Tahun Terbit : 2023

ISBN : 978-623-372-9499

Jml Hlm : xix, 178 hlm, 23 cm

Buku “Etika dan Moral Penegak Hukum di Indonesia” menjadi sangat relevan untuk dibaca, terutama dalam konteks penegakan hukum yang masih banyak menghadapi tantangan seperti kasus korupsi yang melibatkan aparat hukum.

Buku ini tidak hanya membahas masalah-masalah yang ada, tetapi juga menawarkan solusi dengan menyoroti pentingnya etika profesi bagi penegak hukum. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana seharusnya penegak hukum menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme yang tinggi dan berlandaskan pada etika profesi yang kuat.

MAJALAH JDIH KAB MAGELANG

SOBAT JDIH
KABUPATEN MAGELANG

JARINGAN
DOKUMENTASI
DAN
INFORMASI
HUKUM



SCAN LOKASI

Pesona Alam Gunung Gupak

Objek Wisata Yang Terletak Di Desa Wulunggunung,
Kec. Sawangan, Kab. Magelang.



Majalah JDIH Kabupaten Magelang Ed. 2



www.jdih.magelangkab.go.id

16